

Transisi Menuju Green Economy: Tantangan dan Peluang bagi Negara Berkembang

Hilda Zannuba Arrifahakisma¹, ST. Nur Kholifah², Fakhri Abdul Rohman³, Widya Gita Budiyo⁴, Putri Catur Ayu Lestari⁵

^{1,2,3,4,5} Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember

¹hildaznnb0426@email.com, ²sitinurkholifah0283@email.com, ³fakhriabdulrohman@email.com, ⁴widyagita424@gmail.com,

⁵putricatur25@gmail.com

Abstrak

Kerusakan lingkungan, pemanasan global, dan perubahan iklim semakin mengkhawatirkan serta menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan manusia. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah juga menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelestarian lingkungannya. Salah satu upaya strategis yang diambil adalah penerapan konsep ekonomi hijau (green economy) yang menggabungkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Namun, implementasi kebijakan ekonomi hijau di Indonesia tidak lepas dari berbagai hambatan, seperti keterbatasan dana, rendahnya pemahaman publik, serta resistensi sektor industri. Di sisi lain, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan, antara lain kemajuan teknologi ramah lingkungan, peningkatan kesadaran global terhadap isu lingkungan, dan komitmen pada agenda pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan dan peluang dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi hijau di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber ilmiah, termasuk buku, jurnal, laporan pemerintah, penelitian terdahulu, serta dokumen kebijakan terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual implementasi ekonomi hijau di Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perumusan kebijakan publik yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi hijau, kebijakan publik, pembangunan berkelanjutan, tantangan, peluang.

PENDAHULUAN

Dalam dua puluh tahun terakhir, kerusakan ekosistem, kenaikan suhu global, dan perubahan iklim semakin parah dan menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Bencana seperti banjir, banjir rob, polusi udara, polusi air, dan degradasi tanah, serta pergeseran iklim dan cuaca ekstrem, telah terjadi di banyak tempat. Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan suhu global dan perubahan iklim disebabkan oleh kerusakan ekosistem yang signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Situasi ini tidak hanya menciptakan krisis lingkungan tetapi juga memicu krisis sosial, ekonomi, energi, sumber daya, dan berbagai masalah lainnya. Oleh karena itu, inovasi diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya adalah penerapan ekonomi berkelanjutan.

Konsep ekonomi hijau telah menjadi fokus global sebagai pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. United Nations Environment Programme mendefinisikan green economy sebagai ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan manusia sekaligus mengurangi risiko ekologis dan ketimpangan sosial (UNEP, 2011). Selain itu, OECD menjelaskan bahwa pertumbuhan hijau bertujuan memastikan modal alam tetap mampu menyediakan sumber daya penting bagi pembangunan jangka panjang (OECD, 2013).

International Labour Organization (ILO) pun menambahkan bahwa transisi menuju ekonomi hijau akan menghasilkan green jobs, yaitu pekerjaan yang mendukung pengurangan emisi, efisiensi energi, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan (ILO, 2018). Landasan teori ini memperkuat posisi green economy sebagai paradigma pembangunan global yang relevan bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Ekonomi hijau merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang menekankan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, serta menggabungkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Konsep ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, melindungi serta memulihkan ekosistem alam, memperbaiki taraf hidup masyarakat, mengurangi dampak negatif.

lingkungan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan menggalakkan inovasi teknologi ramah lingkungan (Wahida, 2023).

Sejalan dengan gagasan ini, pemerintah Indonesia telah meluncurkan sejumlah inisiatif dan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, termasuk di bidang ekonomi ramah lingkungan. Kebijakan-kebijakan ini mencakup pengembangan sumber energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan praktik pertanian berkelanjutan. Lebih lanjut, Indonesia secara aktif berkolaborasi dengan lembaga internasional dan negara-negara lain untuk memperkuat pembangunan ekonomi ramah lingkungan. Sebagai contoh, Indonesia menandatangani Perjanjian Paris pada tahun 2016 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga menjadi anggota berbagai organisasi internasional seperti Global Green Growth Institute (GGGI) dan Partnership for Action on Green Economy (PAGE). Melalui upaya-upaya ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan (Faza, 2025).

Di Indonesia pelaksanaan kebijakan ini menjadi sangat krusial mengingat situasi letak geografis dan sumber daya alam yang melimpah, namun juga sensitif terhadap pengaruh perubahan cuaca iklim. Walaupun potensi pelaksanaan kebijakan ekonomi ramah lingkungan di Indonesia cukup besar, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Tantangan ini mencakup keterbatasan dana, minimnya pemahaman publik dan pelaku usaha, serta ketahanan dari sektor industri yang menitikberatkan pada manfaat sesaat. Selain itu, perlu adanya dukungan dari beragam pihak yang berkepentingan, termasuk otoritas, industri swasta, dan komunitas agar penerapan dapat berhasil. Sebaliknya, ada sejumlah peluang yang bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kebijakan publik yang mendukung ekonomi berkelanjutan. Inovasi dalam teknologi, peningkatan pemahaman global mengenai isu lingkungan, serta komitmen pada sasaran pembangunan berkelanjutan membawa harapan bahwa kebijakan ekonomi ramah lingkungan dapat dijalankan dengan lebih efisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengkaji tantangan dan peluang yang dihadapi saat pelaksanaan kebijakan publik ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Melalui pengkajian ini diharapkan dapat memberikan saran yang bermanfaat untuk pembuatan kebijakan yang lebih efisien, inklusif, serta berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui tinjauan literatur untuk mengeksplorasi berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi ekonomi ramah lingkungan atau green economy di Indonesia. Metode ini dipilih karena dianggap mampu memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam terkait dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang berkaitan dengan ekonomi ramah lingkungan. Fokus penelitian bersifat deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk menjelaskan serta menganalisis kondisi terkini ekonomi ramah lingkungan dan mengidentifikasi banyaknya potensi serta hambatan yang ada.

Metode literatur yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperkuat dengan pendekatan systematic literature review, yaitu menelaah sumber ilmiah secara terstruktur berdasarkan relevansi, tahun publikasi, dan kontribusinya terhadap topik penelitian (Snyder, 2019). Dengan demikian, hasil analisis menjadi lebih komprehensif dan dapat menggambarkan perkembangan terbaru ekonomi hijau di Indonesia maupun dunia.

Sumber informasi diambil dari berbagai literatur, termasuk buku, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, studi sebelumnya, dan dokumen kebijakan yang relevan. Analisis literatur dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang lengkap mengenai ekonomi ramah lingkungan. Penelitian ini hanya berfokus pada konteks nasional, sehingga hasil yang diperoleh lebih mencerminkan situasi di Indonesia dan tidak membahas penerapan kebijakan ekonomi hijau di negara lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi dan Konsep Green Economy

Green Economy adalah strategi ekonomi yang menggabungkan faktor-faktor sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta menekankan pada pengembangan dan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Ide ini menyoroti pentingnya mencapai pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, melindungi dan memulihkan ekosistem alam, serta meningkatkan standar hidup masyarakat. Ide ini mengakui bahwa undang-undang, praktik, dan investasi yang mengurangi dampak lingkungan negatif, memanfaatkan sumber daya secara efektif, dan mendorong inovasi teknologi hijau diperlukan untuk mempertahankan ekonomi yang berkelanjutan.

Ekonomi hijau didefinisikan sebagai peralihan dari struktur ekonomi yang ada ke metode yang lebih ramah lingkungan. Strategi ini berfokus pada sektor-sektor ekonomi seperti pengelolaan sampah, transportasi, energi, pertanian, dan industri. Mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas dan membangun ekonomi yang lebih efisien dalam penggunaan energi dan sumber daya merupakan tujuan dari ekonomi hijau. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil tanpa mengorbankan kesejahteraan sosial atau keberlanjutan lingkungan.

Perubahan perspektif dan gaya hidup juga terkandung dalam konsep “ekonomi hijau.” Diharapkan masyarakat akan mengadopsi kebiasaan dan pola konsumsi yang berkelanjutan, seperti daur ulang, pengurangan limbah, dan pembelian barang ramah lingkungan. Kesadaran dan pendidikan masyarakat merupakan komponen penting dalam transformasi ini. Ekonomi hijau juga mencakup pengelolaan limbah yang lebih efektif dan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. Hal ini meliputi penerapan teknologi ramah lingkungan, termasuk daur ulang, pengurangan limbah, pengelolaan air yang efektif, dan efisiensi energi. Ekonomi hijau bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan konsumsi sumber daya alam dengan menerapkan strategi-strategi tersebut (Wahida, 2023).

Kajian internasional menekankan bahwa green economy membutuhkan transformasi struktural melalui peningkatan efisiensi energi, investasi hijau, dan penguatan regulasi lingkungan (UNEP, 2021). Selain itu, konsep ekonomi hijau berkaitan erat dengan circular economy, yaitu model produksi dan konsumsi yang meminimalkan limbah dan memaksimalkan pemanfaatan ulang sumber daya (Ellen MacArthur Foundation, 2019). Pemahaman ini penting untuk memperluas konteks implementasi ekonomi hijau di Indonesia.

Ada dua tujuan yang harus dicapai terkait dengan konsep “ekonomi hijau.” Pertama, ekonomi hijau bertujuan untuk mengembangkan teori ekonomi yang memperhitungkan faktor-faktor makroekonomi, terutama investasi di industri yang menghasilkan barang dan jasa ramah lingkungan (investasi hijau), serta bagaimana investasi hijau mendukung penciptaan lapangan kerja di industri ramah lingkungan (lapangan kerja hijau). Kedua, Ekonomi Hijau bertujuan untuk menciptakan standar untuk investasi hijau yang pro-kemiskinan, atau investasi hijau yang dapat mengurangi kemiskinan. Tujuan utama adalah meyakinkan pembuat kebijakan untuk mendukung investasi hijau yang lebih besar dengan melibatkan sektor swasta dan semua tingkatan pemerintah (Ah, 2019).

Implementasi ekonomi hijau memiliki banyak manfaat. Pertama, ekonomi hijau dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor yang berkelanjutan, seperti energi terbarukan dan efisiensi energi. Kedua, ekonomi hijau berkontribusi pada perlindungan lingkungan dengan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Ketiga, ekonomi hijau juga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja yang layak, meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.

2. Tantangan Green Economy

Perlu diakui bahwa implementasi ekonomi hijau masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya kejelasan tentang apa yang mencakup kebijakan ekonomi hijau dan bagaimana mereka berintegrasi dengan kebijakan nasional. Ini menunjukkan bahwa transisi ke ekonomi hijau bukanlah proses yang mudah dan membutuhkan perubahan besar dalam berbagai aspek ekonomi dan sosial. Salah satu tantangan utama dalam implementasi ekonomi hijau adalah risiko lingkungan yang semakin global dan sulit diprediksi (Budi et al., 2024).

Kajian OECD (2019) menunjukkan bahwa banyak negara berkembang menghadapi masalah tumpang tindih regulasi dan ketidakpastian kebijakan yang menghambat investasi hijau. Di Indonesia, proses transisi energi juga terhambat oleh dominasi energi fosil yang masih menjadi penopang ekonomi nasional (Kementerian ESDM, 2023). Selain itu, kemampuan teknologi lokal yang belum merata membuat beberapa sektor masih bergantung pada perangkat impor, terutama pada teknologi energi terbarukan seperti panel surya (IEA, 2021).

Keterbatasan pendanaan juga menjadi hambatan signifikan. UNESCAP (2020) mencatat bahwa negara berkembang membutuhkan alokasi anggaran besar untuk membangun infrastruktur hijau, namun akses terhadap pendanaan global seperti green climate fund masih relatif rendah.

Tantangan menuju green ekonomi yang berkelanjutan :

A. Perubahan pola konsumsi dan produksi

Perubahan pola produksi dan konsumsi merupakan hambatan utama bagi terwujudnya ekonomi hijau yang berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas menjadi fokus utama pola produksi dan konsumsi saat ini, dan peralihan ke ekonomi hijau memerlukan perubahan paradigma di mana daur ulang, konsumsi berkelanjutan, dan efisiensi sumber daya menjadi tujuan utama.

B. Ketergantungan pada energi fosil

Banyak sektor ekonomi masih bergantung pada bahan bakar fosil. Salah satu tantangan terbesar adalah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mempercepat pengembangan energi terbarukan, yang merupakan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Hambatan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan teknologi harus diatasi agar peralihan ini dapat terwujud.

C. Kesenjangan akses dan kapasitas

Mencapai ekonomi hijau yang berkelanjutan juga terhambat oleh keterbatasan kapasitas dan akses. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi negara-negara berkembang adalah akses terhadap teknologi hijau dan dana yang diperlukan untuk berinvestasi dalam infrastruktur berkelanjutan. Bantuan dan kerja sama internasional diperlukan untuk mengatasi kesenjangan ini.

D. Ketidakpastian kebijakan

Peraturan dan insentif yang berkaitan dengan ekonomi hijau masih belum jelas, yang dapat menghambat inovasi dan investasi. Perubahan kebijakan yang sering atau bertentangan juga dapat mengganggu keberlanjutan dan stabilitas jangka panjang pengembangan ekonomi hijau (Environmental et al., 2023).

3. Tantangan Green Economy

Dalam pembangunan berkelanjutan, peluang ekonomi hijau menawarkan sejumlah potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menyeimbangkan antara pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan efisiensi sumber daya melalui penggunaan teknologi hijau dan metode produksi yang lebih berkelanjutan, yang dapat mengurangi dampak lingkungan yang merugikan sambil meningkatkan produktivitas, merupakan salah satu opsi utama. Selain itu, berinvestasi dalam pengembangan dan inovasi teknologi hijau dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja baru. Meningkatkan kesadaran konsumen tentang nilai keberlanjutan lingkungan juga dapat mendorong perubahan perilaku konsumen dan peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa ramah lingkungan. Terakhir, untuk merancang kebijakan yang memfasilitasi transisi ke ekonomi hijau dan mempromosikan pertumbuhan yang lebih adil dan berkelanjutan, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil sangatlah penting (Nurhakiki & Ivanka, 2025).

Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, terutama dari tenaga surya, angin, biomassa, dan panas bumi. Kementerian ESDM (2021) mencatat potensi energi terbarukan Indonesia mencapai lebih dari 3.700 GW. Selain itu, peningkatan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat membuka peluang besar bagi pengembangan industri hijau dan ekonomi sirkular (UNEP, 2021).

ILO (2018) memprediksi bahwa transisi energi bersih dapat menciptakan jutaan pekerjaan hijau di Asia-Pasifik pada 2030. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi ekonomi hijau tidak hanya mendorong keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dan pembahasan mengenai implementasi ekonomi hijau di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa transisi menuju green economy merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk mengatasi berbagai persoalan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang semakin kompleks. Kerusakan ekosistem, perubahan iklim, dan ketergantungan pada energi fosil telah menimbulkan risiko besar bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penerapan ekonomi hijau bukan hanya sebuah alternatif, melainkan kebutuhan mendesak bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

Implementasi ekonomi hijau di Indonesia menunjukkan bahwa negara ini memiliki potensi yang besar, terutama dalam pengembangan energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah, serta inovasi teknologi ramah lingkungan. Dukungan kebijakan pemerintah, kerja sama internasional, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan memberikan peluang penting untuk memperkuat arah pembangunan yang lebih berkelanjutan. Berbagai contoh nyata, seperti pengembangan PLTS terapung, penggunaan kendaraan listrik, dan program waste-to-energy, menunjukkan bahwa langkah-langkah menuju ekonomi hijau telah mulai terlihat di beberapa sektor.

Namun demikian, berbagai tantangan mendasar masih harus diselesaikan. Hambatan seperti keterbatasan pendanaan, ketergantungan pada energi fosil, rendahnya pemahaman masyarakat, ketidakpastian regulasi, dan keterbatasan teknologi menjadi faktor yang memperlambat proses transisi. Tantangan ini menuntut adanya harmonisasi kebijakan, peningkatan kapasitas teknologi nasional, serta kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Secara keseluruhan, ekonomi hijau menawarkan peluang besar bagi Indonesia untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan ramah lingkungan. Transisi menuju ekonomi hijau tidak hanya akan memperkuat daya saing nasional, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan komitmen yang konsisten, dukungan kebijakan yang terarah, serta partisipasi seluruh pemangku kepentingan, Indonesia dapat mempercepat transformasi menuju masa depan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan resilien.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dosen pengampu yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses penulisan. Kami ucapkan juga kepada teman-teman yang telah memberi kami dukungan serta motivasi. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangan kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ah, M. S. (2019). *GREEN ECONOMY INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH*. 3, 83–94.
- Budi, Y., Miranti, A., Bagus, I., & Bhayangkara, K. (2024). *Jurnal Ekonomi Revolutioner IMPLEMENTASI EKONOMI HIJAU DALAM Mendukung Pembangunan Berkelanjutan : Tantangan Dan*. 7(6), 527–533.
- BMKG. (2023). Laporan Analisis Perubahan Iklim Indonesia.
- Ellen MacArthur Foundation. (2019). Circular Economy: Principles and Benefits.
- Environmental, O. F. L., Stability, E., Auliya, F. N., & Nurhadi, N. (2023). *Menuju Ekonomi Hijau Yang Berkelanjutan : Tantangan Dan Peluang Untuk Stabilitas Lingkungan Dan Ekonomi Jangka Panjang*. 5(2), 97–102.
- Faza, A. D. (2025). *Implementasi Kebijakan Green Economy Di Indonesia Dalam Upaya Mendukung Perdagangan Berkelanjutan*. 3(2), 59–64.
- GGGI. (2020). Waste-to-Energy Development in Indonesia.
- ILO. (2018). World Employment and Social Outlook: Greening with Jobs.
- IEA. (2021). Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector.
- Kementan. (2022). Pertanian Organik Indonesia.
- Kementerian ESDM. (2021). Potensi Energi Terbarukan Indonesia.
- Kementerian ESDM. (2023). Statistik Ketenagalistrikan
- KLHK. (2023). Data Persampahan Nasional.
- Nurhakiki, N., & Ivanka, N. A. (2025). *“ Implementasi Kebijakan Ekonomi Hijau Dalam Mewujudkan Pembangunan*

Berkelanjutan : Tantangan Dan Peluang " " Implementation of Green Economic Policy in Realizing Sustainable Development : Challenges and Opportunities " . 5(1), 19–23.

OECD. (2013). Putting Green Growth at the Heart of Development.

OECD. (2019). Green Growth Policy Review.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.

UNEP. (2011). Towards a Green Economy.

UNEP. (2021). Green Economy Progress Report.

UNESCAP. (2020). Financing the Green Transformation.

Wahida, K. (2023). *Tatanan Indonesia Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Green Economy*. 1(2).